

KESERIOUSAN BERNEGARA DIPERTANYAKAN

Perseteruan Indonesia dengan negara tetangga "tercinta" Malaysia kembali memanas belakangan ini. Obyek yang menjadi pemicu perseteruannya apalagi kalau bukan soal perbatasan negara. Setelah isu klaim Blok Ambalat oleh Malaysia mereda, kali ini lokasinya pindah ke kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di ujung barat Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu. Malaysia dianggap melakukan tindakan-tindakan *illegal* di wilayah tersebut yang merugikan Indonesia.

Hampir semua media massa di Indonesia menjadikan peristiwa tersebut sebagai *trending topic* atau *hot issue*. Dimunculkan sebagai *headline* surat kabar lokal maupun nasional, stasiun-stasiun televisi gencar memberitakan perseteruan kedua negara bertetangga tersebut yang dibumbui dengan menampilkan sejarah perseteruan di masa lampau, menuliskannya dalam *running text* yang bisa dibaca setiap saat, melakukan berbagai macam dialog dengan mengundang pakar-pakar dari berbagai kalangan. DPR sibuk berteriak-teriak menyalahkan ketidaksiapan Pemerintah RI dalam bertindak merespon situasi yang ada. Seperti biasa, jajaran pemerintah memiliki jawaban-jawaban diplomatis yang seolah-olah tidak sedang terjadi hal yang serius yang dapat mengancam keutuhan wilayah, bahkan balik mempertanyakan "wilayah Indonesia bagian mana yang di klaim oleh Malaysia?". Di lain sisi, masyarakat juga beraksi keras terhadap persoalan ini, berdemonstrasi, ada yang ikut menyalahkan Pemerintah RI, ada juga yang menghujat Malaysia sebagai negara "maling", bahkan sudah ada kelompok masyarakat yang mendirikan posko sebagai wujud bela negara. Sungguh situasi gegap gempita yang luar biasa. Seharusnya situasi seperti ini bisa menjadi modal yang positif untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia, akan tetapi terkadang situasi yang sebaliknya yang terjadi.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau membahas secara khusus mengenai status hukum dari Camar Bulan dan Tanjung Datu, karena untuk mencari jawaban akurat mengenai status hukum kedua wilayah tersebut memerlukan penelitian komprehensif dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Perkembangannya, dalam suatu dialog di sebuah stasiun televisi (11/10/11), dimana salah satu narasumbernya adalah Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan tegas beliau mengatakan bahwa belum terjadi kesepakatan garis batas antara Indonesia-Malaysia di wilayah tersebut, kesepakatan yang ada selama ini masih berupa MoU, padahal kesepakatan batas negara harus disepakati melalui media Perjanjian Internasional, yang di Indonesia, Perjanjian Internasional mengenai batas negara harus melalui persetujuan DPR, sehingga masih memungkinkan bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan Malaysia untuk menetapkan batas wilayah yang definitif. Pernyataan ini, dalam perspektif penulis sudah cukup untuk mengakhiri polemik mengenai status hukum kedua wilayah tersebut. Paling penting untuk dipikirkan adalah strategi-strategi jitu berikutnya agar jangan sampai keutuhan wilayah Indonesia tergerogoti.

Sekali lagi tulisan ini tidak menjadikan Camar Bulan dan Tanjung Datu sebagai topik utama, tulisan ini akan membahas secara singkat mengenai "keseriusan bernegara" dari negara Indonesia terutama dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara. Pertanyaannya sederhana saja "apakah negara Indonesia benar-benar serius untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan keutuhannya?". Dalam perspektif penulis, jawabannya adalah "belum cukup serius".

Kawasan Perbatasan Sebagai Pagar Depan

Kawasan perbatasan memegang peranan penting bagi keberlangsungan sebuah negara, demikian juga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki wilayah yang sangat luas, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh maupun hak berdaulat. Diibaratkan sebuah rumah, kawasan perbatasan adalah "pagar depan" dari

rumah tersebut. Tentu saja diperlukan "pagar" yang kokoh, kuat dan tangguh untuk melindungi rumah tersebut dari segala macam ancaman yang dapat membahayakan stabilitas rumah tersebut.

Pertanyaannya adalah, "apakah negara Indonesia telah serius dalam memperkokoh "pagar depan" wilayahnya?. Dari perspektif penulis, jawabannya adalah belum cukup serius. Lihat kembali Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa cita-cita didirikannya negara Indonesia diantaranya adalah untuk menciptakan negara yang bersatu dan berdaulat, oleh karena itu, tujuan dibentuk Pemerintahan Negara Indonesia diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pertanyaannya adalah, "apakah cita-cita bersatu dan berdaulat serta tujuan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah (wilayah) Indonesia telah tercapai?". Dalam perspektif penulis, jawabannya adalah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dibuktikan dengan masih sering terancamnya keutuhan wilayah NKRI, baik karena separatisme ataupun karena konflik kawasan perbatasan dengan negara tetangga, serta karena persoalan internal di kawasan perbatasan itu sendiri.

Patut dicermati, bahwa persoalan Camar Bulan dan Tanjung Datu ini bukan persoalan perbatasan yang pertama kali atau yang kedua. Persoalan kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga sudah sering kali terjadi sejak Indonesia merdeka. Belum lepas dari ingatan Indonesia pernah berseteru dengan Malaysia sampai ke Mahkamah Internasional untuk memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang akhirnya jatuh ke kedaulatan Malaysia. Demikian juga dengan persoalan klaim yang diajukan Malaysia atas kepemilikan Blok Ambalat beberapa waktu lalu. Masih ada lagi, masyarakat pernah dibuat terhenyak atas peristiwa ditangkapnya aparat Kementerian Perikanan dan Kelautan RI oleh Polis Diraja Malaysia karena dianggap melanggar batas wilayah di sekitar Perairan Tanjung Berakit. Serta masih ada beberapa persoalan kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga.

Persoalan kawasan perbatasan NKRI tidak hanya berhenti pada persoalan konflik dengan negara tetangga. Secara internal, kawasan perbatasan NKRI ternyata menyimpan berbagai macam persoalan yang jika tidak diantisipasi secara cepat (*quick respond*) sangat berpotensi mengancam keutuhan wilayah NKRI. Lihat saja, sudah berpuluh-puluh hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, buku yang diterbitkan, dan liputan media massa yang mana hampir seluruhnya menyatakan bahwa kawasan perbatasan NKRI dalam situasi dan kondisi yang terbelakang, terisolir, sarana dan prasarana yang minim, bergantung dengan negara tetangga, dan kondisi-kondisi buruk lainnya. Semua sepakat bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan.

Sungguh merupakan sebuah problematika yang sangat pelik dan rumit. Dalam situasi seperti ini, patutlah dipertanyakan keseriusan bernegara dari negara Indonesia, terutama dalam menjaga keutuhan tumpah darah Indonesia.

Keseriusan Bernegara

Memang bukan hal yang mudah untuk mengurus dan mempertahankan keutuhan wilayah negara Indonesia. Ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Logika sederhananya tentu lebih mudah mengurus negara yang luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan mengurus negara besar seperti Indonesia ini.

Oleh karena itu, tidak bisa tanggung jawab yang sedemikian besar ini dibebankan hanya pada Pemerintah RI saja, memang Pemerintah RI berperan sebagai ujung tombak dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah RI memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait untuk dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah pekerjaan multidimensional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua pihak harus menjalankan fungsi dan tugasnya

masing-masing dengan baik serta saling bersinergi. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling lempar tanggung jawab dan saling-saling yang kontraproduktif lainnya harus diminimalisir. DPR tidak bisa serta merta menyalahkan begitu saja Pemerintah RI, sudahkah DPR mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai sistem pertahanan negara yang memadai? Sudahkah DPR membuat regulasi yang tepat sebagai upaya preventif agar wilayah NKRI tidak semakin tergerogoti? Sudahkah DPR mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membangun kawasan perbatasan NKRI agar tidak menjadi kawasan yang terisolir dan terbelakang? Apa tidak lebih baik dana-dana untuk studi banding yang terkadang tidak jelas hasilnya dipergunakan untuk membangun jalan poros penghubung di kawasan perbatasan?.

Demikian halnya dengan Pemerintah RI, yang seolah-olah tidak mau mendengarkan saran dan kritik yang ditujukan kepadanya. Apalagi kalo saran dan kritik itu berasal dari DPR, seolah-olah DPR dianggap sebagai "musuh". Ingat, bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pemerintah dan DPR adalah mitra kerja, dapat dibayangkan apabila dalam sebuah sistem pemerintahan unsur-unsur yang seharusnya menjadi mitra kerja, partner kerja, malah berlaku sebaliknya seperti 2 kutub magnet yang sama bertemu. Tidak pernah seiya sekata segendang seirama. Hal ini juga terjadi pada hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terkadang sinergitas diantara keduanya bagaikan air dan minyak, dalam 1 wadah tapi tidak bisa bercampur, masing-masing jalan dengan programnya sendiri-sendiri.

Bagaimana dengan masyarakat atau rakyat Indonesia? Sebagai bagian dari unsur kehidupan bernegara, rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat penting, ketika organ negara tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, rakyatlah yang harus bertindak mendorong organ-organ negara yang "tertidur" tadi untuk kembali bangkit dan berfungsi sebagaimana mestinya. Bela negara tidak harus diwujudkan dengan perbuatan fisik, lakukan bela negara dengan cara yang berdasarkan aturan dan elegan, jangan malah melakukan dengan cara-cara yang dapat merugikan diri dan negara sendiri, demonstrasi-demonstrasi yang merusak property milik negara seharusnya bukan jalan yang ditempuh, lebih baik buat forum-forum diskusi yang menghasilkan konsep atau model atau strategi-strategi jitu dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara.

Sekali lagi ditekankan, sinergitas diantara unsur-unsur dalam negara mutlak diperlukan. Tanpa kesinergian niscaya hasil yang diperoleh pun juga tidak akan memuaskan. Keseriusan bernegara dari masing-masing unsur menjadi kunci utama. Segala sesuatu yang dikerjakan secara serius berbanding lurus dengan hasil yang memuaskan. Lebih seriuslah dalam mengurus negara ini, karena ini bukan ajang main-main. Terlalu besar harga yang harus dibayar jika kita tidak serius dalam mengurus negara ini. Sekali lagi, keseriusan bernegara.

Pada akhirnya, tetap optimis, berpikir positif, dan jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena itu adalah jalan menuju kehancuran. Yakinlah bahwa dengan kekuatan yang Indonesia miliki, persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

Oleh : Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Diterbitkan dalam Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Edisi Ke-5 Januari 2012 hlm. 15-20.